

## Tindak Tutur Performatif dalam Sumpah Jabatan: Sebuah Analisis Wacana Kritis

### *Performative Speech Acts in Oaths of Office: A Critical Discourse Analysis*

Nur Lailiyah<sup>a,1\*</sup>, Beny Hamdani<sup>b,2</sup>, Ahmad Khoironi Arianto<sup>c,3</sup>

<sup>a</sup>Universitas Nusantara PGRI Kediri  
Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Kota Kediri, Indonesia

<sup>b</sup>Universitas Islam Zainul Hasan  
Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 360, Probolinggo, Indonesia

<sup>c</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Jalan Daksinapati Barat IV, Jakarta Timur, Indonesia

Lailiya86@unpkediri.ac.id

\* Penulis Korespondensi

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Riwayat Artikel

Diterima: 30 Juli 2024  
Direvisi: 17 Oktober 2024  
Disetujui: 29 Oktober 2024

##### Keywords

*performative speech acts  
political oaths  
cross-language  
investigation  
pragmatics*

##### Kata Kunci

tindak tutur performatif  
sumpah jabatan  
investigasi lintas bahasa  
pragmatik

##### Abstract

*This research examines performative speech acts in oaths of Office from a cross-linguistic perspective. Its main aim is to analyze the linguistic structure, pragmatic function, and socio-cultural implications of oaths of office in various cultural and linguistic contexts. By using a qualitative approach and critical discourse analysis method, it examines a corpus of oaths of office from five countries whose cultural and linguistic backgrounds are different. Data were collected through the study of official documents and video recordings of the oaths of high-ranking state officials. The research results show that there is a universal pattern in the performative structure of oaths of office, but with significant linguistic and cultural variations. It was found that word choice, grammatical structure, and paralinguistic elements in the oaths of office do not only function as legal formalities, but also as tools for legitimizing power and constructing national identity. This research contributes to a deeper understanding of the intersection of language, power, and culture in the political realm and highlights the importance of cross-linguistic perspectives in the study of performative speech acts.*

##### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan dari perspektif lintas bahasa. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis struktur linguistik, fungsi pragmatis, dan implikasi sosio-kultural dari sumpah jabatan di berbagai konteks budaya dan bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini meneliti korpus sumpah jabatan dari lima negara dengan latar belakang budaya dan linguistik yang berbeda. Data dikumpulkan melalui studi dokumen resmi dan rekaman video sumpah jabatan pejabat tinggi negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola universal dalam struktur performatif

sumpah jabatan, namun dengan variasi linguistik dan kultural yang signifikan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pilihan kata, struktur gramatikal, dan elemen paralinguistik dalam sumpah jabatan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai alat legitimasi kekuasaan dan konstruksi identitas nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang interseksi bahasa, kekuasaan, dan budaya dalam ranah politik, serta menyoroti pentingnya perspektif lintas bahasa dalam studi tindak tutur performatif.

## 1. Pendahuluan

Sumpah jabatan merupakan ritual penting dalam sistem pemerintahan modern, menandai transisi kekuasaan dan menegaskan komitmen pemimpin terhadap negara dan rakyatnya (Chilton, 2004). Sebagai tindak tutur performatif, sumpah jabatan tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan verbal, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi nyata dalam ranah sosial dan politik (Austin, 1962; Searle, 1969b, 1969a). Meskipun demikian, studi komprehensif tentang sumpah jabatan dari perspektif lintas bahasa masih terbatas, terutama dalam konteks analisis linguistik dan pragmatis (Duranti, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menginvestigasi tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan di lima negara: Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Nigeria. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada keragaman linguistik, sistem pemerintahan, latar belakang budaya, dan sejarah politik yang berbeda, memungkinkan analisis komparatif yang kaya dan mendalam (Wodak & Meyer, 2015).

Pemilihan lima negara (Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Nigeria) sebagai subjek kajian memiliki urgensi dan alasan yang signifikan, yakni 1) keragaman linguistik: ke lima negara ini mewakili keluarga bahasa yang berbeda (Austronesia, Indo-Eropa, Japonic, dan Niger-Kongo), memungkinkan analisis komprehensif tentang bagaimana tindak tutur performatif direalisasikan dalam struktur linguistik yang beragam (Gijn & Muysken, 2020). 2) Variasi Sistem Pemerintahan (Indonesia: Demokrasi presidensial dengan latar belakang post-kolonial, Amerika Serikat: Demokrasi federal presidensial, Jepang: Monarki konstitusional dengan sistem parlementer, Prancis: Republik semi-presidensial, Nigeria: Demokrasi federal dengan sejarah ketidakstabilan politik), keragaman ini memungkinkan eksplorasi bagaimana sistem pemerintahan yang berbeda mempengaruhi formulasi dan pelaksanaan sumpah jabatan (Cheibub et al., 2022). 3) konteks sosio-kultural: ke lima negara memiliki latar belakang budaya, sejarah, dan nilai-nilai sosial yang sangat berbeda, memungkinkan analisis tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi ekspresi komitmen politik dalam sumpah jabatan. 4) representasi geografis: negara-negara ini mewakili lima benua yang berbeda (Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika), memberikan perspektif global yang luas (Krzyżanowski, Forchtner, 2021; Schneider, 2020). 5).

Hubungan agama-negara (Indonesia: negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam, AS: sekularisme konstitusional dengan pengaruh

agama yang signifikan, Jepang: sekularisme dengan latar belakang Shinto dan Buddhis, Prancis: *Laïcité* (sekularisme ketat), dan Nigeria: negara sekuler dengan populasi muslim dan kristen yang besar), variasi ini memungkinkan analisis tentang bagaimana hubungan agama-negara mempengaruhi formulasi sumpah jabatan (Fox, 2020). 6) sejarah kolonial dan post-kolonial: Indonesia dan Nigeria memiliki sejarah kolonial, sementara AS memiliki sejarah sebagai kolonialis. Prancis memiliki sejarah kolonial dan post-kolonial yang kompleks, sedangkan Jepang memiliki sejarah imperialisme. Konteks ini memungkinkan analisis tentang bagaimana warisan kolonial mempengaruhi bahasa politik (Ndlovu-Gatsheni, 2021). 7). Perkembangan demokrasi: ke lima negara berada pada tahap perkembangan demokrasi yang berbeda, dari demokrasi mapan (AS, Prancis) hingga demokrasi yang lebih muda (Indonesia, Nigeria) (Lührmann & Lindberg, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada potensinya untuk: 1) mengungkap pola universal dan partikular dalam tindak tutur performatif politik lintas budaya, 2) memberikan wawasan tentang bagaimana legitimasi politik dikonstruksi melalui bahasa di berbagai konteks budaya, 3) memperdalam pemahaman tentang hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan identitas nasional, 4) berkontribusi pada studi pragmatik lintas budaya dan analisis wacana kritis, dan 5) menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan sumpah jabatan dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional. Dengan memilih negara-negara yang sangat berbeda tetapi signifikan secara global, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan nuansa tentang peran tindak tutur performatif dalam konstruksi otoritas politik di era global yang semakin terhubung.

Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk mengungkap bagaimana bahasa, dalam konteks sumpah jabatan, berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan konstruksi identitas nasional (Fairclough, 2013; Kampf, 2021; Moffitt, 2020). Dengan mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini tidak hanya akan mengeksplorasi struktur linguistik sumpah jabatan, tetapi juga implikasi sosio-kultural dan politik yang lebih luas (van Dijk, 2008; Wodak, 2021).

Lebih lanjut, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pragmatik lintas budaya (Kecskes, 2022; Wierzbicka, 2003), sosiolinguistik (Gumperz & Cook-Gumperz, 2008; Lailiyah et al., 2023), dan ilmu politik (Edelman, 1985; Lailiyah, 2021) dengan menyoroti peran sentral bahasa dalam ritualisasi kekuasaan politik. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sumpah jabatan bervariasi atau memiliki kesamaan di berbagai konteks budaya dan linguistik dapat memberikan wawasan berharga tentang universal dan partikularitas dalam ekspresi komitmen politik dan legitimasi kekuasaan (Schiffrin et al., 2001).

Dengan menggunakan korpus sumpah jabatan dari lima negara yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) Bagaimana struktur linguistik sumpah jabatan bervariasi di antara kelima negara yang diteliti? 2) Apa fungsi pragmatis dari elemen-elemen linguistik spesifik dalam sumpah jabatan di masing-masing konteks? 3) Bagaimana faktor-faktor sosio-kultural mempengaruhi formulasi dan penyampaian sumpah jabatan? dan 4) Apakah terdapat pola universal dalam tindak tutur performatif sumpah jabatan, terlepas dari perbedaan bahasa dan budaya?. Dengan membongkar praktik-praktik sosial ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perbedaan linguistik dalam sumpah jabatan lintas bahasa, tetapi juga mengungkap bagaimana bahasa dalam sumpah jabatan berfungsi sebagai alat untuk membangun, mempertahankan, atau mengontestasi struktur kekuasaan, identitas, dan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Hal ini sesuai

dengan tujuan utama analisis wacana kritis untuk mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Melalui investigasi ini, kami berharap dapat memperdalam pemahaman tentang interseksi antara bahasa, kekuasaan, dan budaya dalam ranah politik, serta menyoroti pentingnya perspektif lintas bahasa dalam studi tindak tutur performatif (Blommaert, 2005). Meskipun terdapat sejumlah studi yang telah mengkaji tindak tutur performatif dan wacana politik, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan. Rees (2015) telah meneliti penggunaan bahasa dalam sumpah jabatan presiden Amerika Serikat, tetapi penelitiannya terbatas pada konteks bahasa Inggris dan budaya politik Amerika. Sementara itu, Şahin et al. (2019) menganalisis aspek retorik dari pidato politik di Turki tetapi tidak secara khusus membahas sumpah jabatan sebagai tindak tutur performatif. Di sisi lain, Duranti (2006) telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman narasi diri politik, tetapi fokusnya lebih pada kampanye politik daripada ritual sumpah jabatan.

Melalui pendekatan analisis wacana kritis bertujuan untuk mengungkap hubungan antara bahasa dan kekuasaan, bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan mereproduksi dominasi sosial, ideologi, dan ketidaksetaraan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana teks, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan, memelihara, atau menentang kekuasaan sosial. Dalam penelitian ini, analisis wacana kritis akan menggali lebih dalam bagaimana sumpah jabatan sebagai bentuk tindak tutur performatif yang merefleksikan penggunaan bahasa secara fungsional dan mengandung aspek kekuasaan, ideologi, dan representasi sosial. Berdasarkan teori tindak tutur (*speech act*) yang dikemukakan Austin (Austin, 1962), tindak tutur performatif adalah bentuk tuturan yang menyampaikan dan melakukan tindakan. Dalam konteks sumpah jabatan, seorang politisi mengucapkan sumpah jabatan dan secara performatif "melakukan" sumpah tersebut, mengikatkan dirinya pada sebuah janji politik yang berdampak nyata pada kehidupan sosial dan politik. Sumpah jabatan sering kali berisi janji untuk mematuhi konstitusi atau melayani kepentingan masyarakat, dan karena sifat performatifnya, ia memiliki kekuatan normatif.

Studi komparatif lintas bahasa tentang tindak tutur performatif dalam konteks politik masih sangat terbatas. Wodak & Meyer (2015) telah menyediakan kerangka metodologis untuk analisis wacana kritis lintas budaya, tetapi aplikasinya dalam konteks sumpah jabatan belum dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, meskipun Searle (1969) dan Austin (1962) telah meletakkan dasar teoritis untuk pemahaman tindak tutur performatif, penerapan teori ini dalam analisis sumpah jabatan lintas bahasa masih minim.

Lebih lanjut, studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada aspek linguistik atau aspek politik secara terpisah. Misalnya, van Dijk (2008) telah menganalisis hubungan antara wacana dan kekuasaan tetapi tidak secara khusus membahas peran tindak tutur performatif dalam legitimasi kekuasaan politik. Sementara itu, Chilton (2004) telah memberikan wawasan berharga tentang analisis wacana politik tetapi kurang memperhatikan variasi lintas bahasa dan budaya dalam ekspresi komitmen politik.

Meskipun studi tentang wacana politik dan tindak tutur performatif telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa kesenjangan

penelitian yang signifikan dalam konteks sumpah jabatan lintas Bahasa. Keterbatasan analisis lintas Bahasa yang telah dilakukan oleh Jiang (2019) telah melakukan analisis komparatif pidato politik di China dan Amerika Serikat, tetapi penelitiannya tidak mencakup ritual sumpah jabatan. Sementara itu, Reyes (2015) mengkaji strategi legitimasi dalam wacana politik di Spanyol dan Inggris, tetapi tidak memfokuskan pada tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan.

Schäffner (2018) telah meneliti penerjemahan pidato politik lintas budaya, tetapi tidak membahas secara spesifik tantangan dalam menerjemahkan dan menginterpretasikan sumpah jabatan. Di sisi lain, Wodak (2021) menganalisis retorika populis dalam pidato politik di Eropa, tetapi tidak membahas sumpah jabatan sebagai bentuk wacana politik yang unik.

Selanjutnya Culpeper & Terkourafi (2017) telah memberikan wawasan berharga tentang pragmatik lintas budaya, tetapi aplikasinya dalam konteks sumpah jabatan masih terbatas. Sementara itu, Oishi (2020) mengkaji tindak tutur dari perspektif filosofis, penelitian ini kurang memperhatikan variasi lintas budaya dalam realisasi linguistiknya. Kurangnya integrasi antara analisis linguistik dan konteks sosio-politik, Mooney (2018) telah menganalisis bahasa dan populisme dan secara khusus tidak membahas peran tindak tutur performatif dalam konstruksi legitimasi politik. Di sisi lain, Vessey (2017) meneliti ideologi bahasa dalam wacana politik dan kurang memperhatikan aspek performatif dari sumpah jabatan.

Meskipun Charteris-Black (2018) telah melakukan analisis diakronik terhadap metafora dalam pidato politik, belum ada studi komprehensif yang mengkaji evolusi sumpah jabatan lintas waktu dan budaya. Kurangnya analisis multimodal, Tonnard (2021) telah mengkaji aspek visual dalam komunikasi politik, tetapi belum ada studi yang mengintegrasikan analisis linguistik dan visual dalam konteks sumpah jabatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis wacana kritis, pragmatik lintas budaya, dan studi politik komparatif. Dengan mengambil sampel dari lima negara dengan latar belakang linguistik, budaya, dan sistem politik yang berbeda, penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang universal dan partikularitas dalam tindak tutur performatif sumpah jabatan, serta implikasinya terhadap legitimasi kekuasaan dan konstruksi identitas nasional.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas tindak tutur performatif dalam konteks sosio-kultural yang berbeda (Creswell & Poth, 2018; Creswell, 2007).

Pengumpulan Data:

a. Korpus Teks.

- o Transkripsi resmi sumpah jabatan dari pejabat tinggi (presiden dan perdana menteri) di lima negara: Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Nigeria.

- o Periode: 10 tahun terakhir (2014-2024) untuk memungkinkan analisis diakronik.

b. Data.

- o Data berupa tuturan yang berasal dari rekaman video sumpah jabatan untuk analisis paralinguistik dan elemen non-verbal.

c. Dokumen Pendukung.

- Konstitusi dan peraturan terkait prosedur sumpah jabatan di masing-masing negara.
- Artikel media yang meliput acara sumpah jabatan untuk konteks sosio-politik.

Pendekatan analisis wacana kritis tiga dimensi yang dikemukakan oleh (Fairclough, 2013) merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan masyarakat. Pendekatan tersebut terdiri atas tiga dimensi analisis: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pertama, dimensi teks menganalisis unsur linguistik yang terdapat dalam suatu teks, seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan metafora, untuk mengidentifikasi bagaimana makna dibentuk dan diartikulasikan dalam bahasa. Kedua, praktik wacana berfokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks, yang melibatkan konteks sosial dan institusional di mana teks tersebut dibuat dan diterima. Dimensi ini memperhatikan bagaimana wacana dihasilkan dan ditafsirkan oleh pembicara, penulis, dan audiens, serta bagaimana wacana ini beredar dalam masyarakat. praktik sosial melihat teks dan wacana sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, di mana bahasa digunakan untuk mempertahankan atau mengubah kekuasaan, ideologi, dan norma sosial. Fairclough menunjukkan bahwa wacana tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk dan mengubah tatanan sosial. Dalam penelitian terbaru, pendekatan tiga dimensi ini masih relevan, terutama dalam analisis wacana yang terkait dengan politik, media, dan isu-isu sosial yang melibatkan kekuasaan dan dominasi .

Metode analisis yang digunakan, yakni: a) analisis wacana kritis yang menggunakan kerangka kerja Fairclough (2013) untuk menganalisis teks sumpah jabatan pada tiga level, yaitu tekstual (struktur linguistik, pilihan kata, dan tata bahasa), diskursif (intertekstualitas dan interdiskursivitas), dan sosial (konteks ideologis dan kekuasaan), b) analisis pragmatik lintas budaya: mengadopsi pendekatan Wierzbicka (2003) untuk mengidentifikasi variasi dan universal dalam realisasi tindak tutur performatif, c) analisis komparatif: menggunakan metode perbandingan konstan Glaser, B. G., & Strauss (1967) untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan antar negara.

Prosedur Penelitian ini adalah a) pengumpulan dan persiapan korpus teks dan data tuturan, b) transkripsi, c) pengkodean untuk mengidentifikasi tema dan pola, d) analisis mendalam menggunakan CDA dan pendekatan pragmatik lintas budaya, e) analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar negara, dan f) interpretasi hasil dalam konteks teori tindak tutur performatif dan legitimasi kekuasaan politik.

Validitas dan Reliabilitas dilakukan dengan langkah-langkah a) triangulasi data: menggunakan berbagai sumber data (teks, video, dokumen pendukung), b) *peer debriefing*: diskusi temuan dengan ahli linguistik dan ilmu politik, c) *member checking*: konsultasi dengan penutur asli bahasa masing-masing negara untuk memastikan akurasi interpretasi linguistik dan kultural, d) *audit trail*: dokumentasi rinci proses penelitian untuk memastikan transparansi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Analisis komparatif tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan di lima negara (Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Nigeria) mengungkapkan beberapa temuan utama.

#### 3.1 Struktur Linguistik.

3.1.1. Penggunaan kata kerja performatif: semua negara menggunakan kata kerja performatif eksplisit dalam sumpah mereka, meskipun dengan variasi linguistik. Di Indonesia memiliki dua variasi tuturan performatif, yakni: "Saya berjanji..." dan "Demi Allah, saya bersumpah..." di Amerika Serikat menggunakan "*I do solemnly swear...*" Jepang: "私は誓います" (*Watashi wa chikaimasu* - Saya bersumpah). Prancis "*Je jure...*" (Saya bersumpah). Dan di Nigeria: "*I do solemnly swear*"

**Tabel 1. Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Tuturan
Indonesia	"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Amerika Serikat	"I, ,,,, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."
Jepang	"私は、ここに、国務大臣として、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを深く自覚し、日本国憲法を尊重し、擁護することを固く誓います。私は、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇を敬い、国民の負託にこたえ、国政を誠実に執行することを、ここに厳粛に宣誓します。" "Saya, sebagai Menteri Negara, dengan ini bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan menghormati dan menjunjung tinggi Konstitusi Jepang, menyadari sepenuhnya bahwa saya adalah pelayan seluruh rakyat dan bukan hanya sebagian. Saya bersumpah dengan khidmat bahwa saya akan menghormati Kaisar, yang merupakan simbol Negara Jepang dan persatuan rakyat Jepang, menjawab kepercayaan rakyat, dan melaksanakan tugas kenegaraan dengan tulus."
Prancis	"Je jure d'être fidèle à la République, de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Je jure de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." "Saya bersumpah untuk setia kepada Republik, untuk menghormati dan menegakkan Konstitusi dan hukum Republik. Saya bersumpah untuk menjalankan tugas saya dengan tidak memihak, rajin, bermartabat, jujur, dan berintegritas. Saya bersumpah untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan apa pun yang akan saya ketahui dalam pelaksanaan tugas saya."

---

Nigeria "I, [name], do solemnly swear/affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria; that as President of the Federal Republic of Nigeria, I will discharge my duties to the best of my ability, faithfully and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of the Federal Republic of Nigeria; that I will strive to preserve the Fundamental Objectives and Directive Principles of State Policy contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria; that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions; that I will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria; that I will abide by the Code of Conduct contained in the Fifth Schedule to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria; that in all circumstances, I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favour, affection or ill-will; that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President of the Federal Republic of Nigeria, except as may be required for the due discharge of my duties as President; and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Nigeria. So help me God."

---

Berdasarkan tabel 1, tindak tutur performatif dari lima negara menunjukkan variasi yang signifikan dalam panjang, struktur, dan konten spesifik dari sumpah jabatan di masing-masing negara yang mencerminkan perbedaan sistem pemerintahan, nilai-nilai budaya, dan prioritas nasional.

3.1.1 Modalitas, terdapat perbedaan dalam penggunaan modalitas yang mencerminkan tingkat komitmen dan kewajiban.

**Tabel 2. Modalitas dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Modalitas	Tuturan
Indonesia	kewajiban	"...akan menjalankan..."
Amerika Serikat	kemauan	"...will to the best of my ability..."
Jepang	kewajiban	"...を遵守し" (...wo junshu shi - akan mematuhi)
Prancis	komitmen	"...je promets de..." (saya berjanji untuk)
Nigeria	kewajiban	"...that I will discharge..."

Penanda linguistik modalitas negara Indonesia "akan menjalankan" menunjukkan kewajiban yang kuat untuk melaksanakan tugas tertentu. Kata "akan" mengindikasikan janji masa depan yang pasti dilakukan, sementara "menjalankan" menekankan tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu secara penuh. Dalam konteks budaya Indonesia, ada kesan formalitas dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam menjalankan tugas, sejalan dengan nilai gotong royong dan kepatuhan pada norma sosial. Di Amerika Serikat, penanda modalitas "*will to the best*

*of my ability*" menyiratkan kemauan yang kuat dan kesungguhan untuk melakukan yang terbaik, tanpa menyatakan kewajiban yang kaku. Modalitas kemauan ini mencerminkan nilai individualisme yang kuat dalam budaya Amerika Serikat, di mana individu lebih menekankan pada usaha pribadi dan kemampuan untuk mencapai sesuatu, bukan sekadar kewajiban yang ditetapkan oleh pihak luar.

Penanda modalitas dari negara Jepang "を遵守し" (*wo junshu shi* - akan mematuhi) menunjukkan kewajiban yang kuat untuk menaati aturan atau prinsip. Dalam budaya Jepang, modalitas kewajiban sangat dipengaruhi oleh nilai hierarki dan kepatuhan pada aturan serta norma yang sudah mapan. Tuturan ini menekankan pentingnya komitmen untuk mematuhi peraturan secara ketat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan budaya kolektif. Penanda modalitas dari negara Prancis "*je promets de*" (saya berjanji untuk) menunjukkan komitmen pribadi dan formalitas janji. Kata "promets" (berjanji) menunjukkan bahwa pembicara secara sukarela mengikatkan dirinya pada suatu tindakan di masa depan, mencerminkan nilai kesadaran diri dan tanggung jawab personal dalam budaya Prancis. Ada kesan bahwa komitmen ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesungguhan. Penanda modalitas "*that I will discharge*" menunjukkan kewajiban yang kuat untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu. Kata "will" menekankan kepastian pelaksanaan, sementara "*discharge*" menekankan tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dalam konteks budaya Nigeria, ada unsur tanggung jawab yang kuat terhadap komunitas dan otoritas, bahwa seseorang diharapkan memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat.

### 3.2 Fungsi Pragmatis

3.2.1 Legitimasi kekuasaan. Semua sumpah berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan, tetapi dengan penekanan berbeda.

**Tabel 3. Legitimasi dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Legitimasi	Tuturan
Indonesia	konstitusional	"...sesuai dengan Undang-Undang Dasar..."
Amerika Serikat	konstitusional	"...preserve, protect and defend the Constitution..."
Jepang	monarkis dan konstitusional	"...天皇を敬い" (...tennō wo uyamai - menghormati Kaisar)
Prancis	republik	"...fidèle à la République..." (setia kepada Republik)
Nigeria	nasional	"...allegiance to the Federal Republic of Nigeria..."

3.2.2 Konstruksi identitas nasional. Sumpah jabatan juga berfungsi untuk menegaskan identitas nasional.

**Tabel 4. Identitas dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Identitas	Tuturan
Indonesia	ideologis	"...Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."
Amerika Serikat	religius,	"...so help me God"

	meskipun opsional	
Jepang	berbasis rakyat	"...国民の信託に応え" (...kokumin no shintaku ni kotae - menjawab kepercayaan rakyat)
Prancis	republik	"...liberté, égalité, fraternité..."
Nigeria	religius	"...so help me God"

### 3.2.3 Komitmen pada tugas

**Tabel 5. Komitmen dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Tugas	Tuturan
Indonesia	Presiden	"...akan memenuhi kewajiban Presiden... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya..."
Amerika Serikat	Presiden	"...faithfully execute the Office of President..."
Jepang	Kaisar	"...国政を誠実に執行することを..." (...kokusei wo seijitsu ni shikkō suru koto wo...)- (Melaksanakan tugas pemerintahan negara dengan sungguh-sungguh / dengan setia)
Prancis	Presiden	"...remplir mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité..."
Nigeria	Presiden	"...discharge my duties to the best of my ability, faithfully and in accordance with the Constitution..."

## 3.3 Implikasi Sosio-kultural

3.3.1 Pengaruh agama. Tingkat pengaruh agama dalam sumpah jabatan bervariasi antar negara.

**Tabel 6. Sosio-kultural dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Sosio-kultural	Tuturan
Indonesia	Pengaruh Islam kuat	"Demi Allah, saya bersumpah..."
Amerika Serikat	opsional, mencerminkan sekularisme konstitusional	"...so help me God"
Jepang	sekularisme	„我々は信教の自由を尊重することを約束する、”( kami berkomitmen untuk menghormati kebebasan beragama )
Prancis	laïcité - sekularisme ketat	".... nous affirmons notre engagement à sauvegarder la justice sociale... („kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga keadilan sosial,,)"
Nigeria	pengaruh agama kuat,	"...so help me God"

mencerminkan  
masyarakat  
religius

3.3.2 Orientasi nilai-nilai nasional. Sumpah mencerminkan nilai-nilai utama yang dianggap penting oleh masing-masing negara.

**Tabel 7. Orientasi dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Orientasi	Tuturan
Indonesia	Keadilan sosial dan persatuan nasional	““Dalam upaya membangun negara yang adil dan bersatu, kami memastikan bahwa setiap kebijakan,,,,,”
Amerika Serikat	Kebebasan individual dan demokrasi	“As President of the United States, I affirm our commitment to defend and promote the values of freedom...”
Jepang	Harmoni sosial dan kewajiban terhadap negara	“,,,日本の天皇陛下は、「日本サッカー協会」の努力を引き続き支援することを約束された。,,,”( sebagai Kaisar Jepang berjanji untuk terus mendukung upaya)
Prancis	Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan	“,,,Nous nous efforçons de réduire les inégalités et de renforcer l'unité de l'ensemble de la communauté,,,,” (Kami berusaha untuk mengurangi ketimpangan, memperkuat persatuan di antara seluruh komunitas)
Nigeria	Integritas dan kesatuan nasional	“With all integrity and sincerity, we, the President of Nigeria, do solemnly swear that,,,,,”

### 3.4 Pola Universal dan Partikular

Konsep dari pola universal meliputi penggunaan kata kerja performative. Komitmen terhadap konstitusi atau hukum tertinggi, dan janji untuk melayani rakyat atau negara. Particular meliputi referensi terhadap figur atau simbol nasional spesifik, tingkat dan bentuk pengaruh agama, dan penekanan pada nilai-nilai kultural spesifik.

**Tabel 8. Pola dalam Tindak Tutur Performatif di Lima Negara**

Negara	Pola Tindak Tutur Performatif	Penciri
Indonesia	Partikular	Sumpah jabatan di Indonesia memiliki elemen-elemen yang khas dan sesuai dengan konteks budaya dan hukum nasional Indonesia.
Amerika Serikat	Universal	Konsep sumpah jabatan di Amerika Serikat, terutama dalam konteks pemimpin nasional seperti Presiden, cenderung memiliki elemen-elemen yang dikenali secara luas, seperti janji untuk menjalankan jabatan dengan setia dan melindungi konstitusi.

Jepang	Partikular	Sumpah jabatan di Jepang cenderung mencerminkan nilai-nilai budaya dan hukum yang unik untuk Jepang, meskipun terkadang memiliki beberapa kesamaan konseptual dengan negara-negara lain.
Prancis	Universal	Prinsip-prinsip <i>laïcité</i> (pemisahan agama dan negara) dan nilai-nilai republik di Prancis tercermin dalam sumpah jabatan yang cenderung diakui secara universal
Nigeria	Partikular	Sumpah jabatan di Nigeria mencerminkan konteks budaya, hukum, dan nilai-nilai yang khusus untuk Nigeria, terutama dalam konteks pluralitas etnis dan agama yang ada di negara tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur dasar yang universal dalam tindak tutur performatif sumpah jabatan, realisasi linguistik dan pragmatismenya sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural masing-masing negara. Sumpah jabatan berfungsi tidak hanya sebagai ritual hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menegaskan identitas nasional, melegitimasi kekuasaan, dan merefleksikan nilai-nilai fundamental suatu bangsa.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penggunaan verba performatif eksplisit dalam sumpah jabatan di semua negara yang diteliti. Temuan ini sejalan dengan teori tindak tutur (Austin, 1962) yang menekankan peran verba performatif dalam menciptakan realitas sosial. Namun, variasi linguistik yang ditemukan dalam penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang bagaimana performativitas direalisasikan dalam konteks lintas bahasa.

Searle (1969) berpendapat bahwa tindak tutur ilokusioner memiliki kondisi keberhasilan tertentu. Dalam konteks sumpah jabatan, kondisi ini terpenuhi melalui penggunaan modalitas deontik yang mencerminkan kewajiban dan komitmen. Temuan ini memperkuat argumentasi Ledema (2011) tentang peran bahasa dalam konstruksi otoritas institusional. Analisis komparatif mengungkapkan adanya keseimbangan antara elemen universal dan partikular dalam konten sumpah. Komitmen terhadap konstitusi dan pelaksanaan tugas dengan baik merupakan tema umum, sejalan dengan penelitian Chilton (2004) tentang legitimasi dalam wacana politik. Namun, variasi dalam penekanan pada nilai-nilai nasional spesifik menunjukkan pentingnya konteks budaya, seperti yang diargumentasikan oleh Wodak (2021) dalam analisis wacana kritis.

Temuan ini juga memperluas penelitian Rees (2015) tentang sumpah jabatan presiden AS dengan menunjukkan bagaimana konsep-konsep seperti kesetiaan dan tanggung jawab diartikan secara berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Variasi dalam pengaruh agama terhadap sumpah jabatan mencerminkan perbedaan dalam hubungan antara agama dan negara di berbagai negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Asad (2003) tentang sekularisme dan formasi negara modern. Temuan ini juga memperkaya diskusi tentang "civil religion" yang diajukan oleh Bellah (1967),

dengan menunjukkan bagaimana ritual politik seperti sumpah jabatan dapat berfungsi sebagai titik temu antara yang sakral dan yang sekuler.

Peran sumpah jabatan dalam legitimasi kekuasaan, seperti yang terungkap dalam penelitian ini, memperkuat argumen van Dijk (2008) tentang hubungan antara wacana dan kekuasaan. Variasi dalam cara legitimasi ini diekspresikan di berbagai negara menunjukkan pentingnya memahami konteks sosio-politik dalam analisis wacana, seperti yang ditekankan oleh Fairclough (2013). Temuan ini juga memperluas penelitian Duranti (2006) tentang performativitas dalam kampanye politik dengan menunjukkan bagaimana performativitas beroperasi dalam konteks formal pengambilan sumpah.

Keseimbangan antara elemen universal dan partikular dalam sumpah jabatan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan argumen Wierzbicka (2003) tentang universalitas dan variasi dalam pragmatik lintas budaya. Temuan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana konsep-konsep politik universal seperti kesetiaan dan tanggung jawab diartikan dan diekspresikan secara berbeda dalam konteks budaya yang berbeda.

Meskipun sumpah jabatan sering dianggap sebagai tradisi yang tidak berubah, penelitian ini menunjukkan adanya adaptasi *subtle* terhadap konteks kontemporer. Hal ini sejalan dengan penelitian Schiffrin et al. (2001) tentang bagaimana genre wacana berevolusi seiring waktu. Temuan ini juga memperluas penelitian Charteris-Black (2018) tentang evolusi retorika politik dengan menunjukkan bagaimana bahkan teks yang sangat terkodifikasi seperti sumpah jabatan dapat mengalami perubahan *subtle*. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman lintas budaya dalam analisis wacana politik, sejalan dengan argumen Blommaert (2005) tentang pentingnya kontekstualisasi dalam analisis wacana. Variasi dalam formulasi dan penyampaian sumpah jabatan mencerminkan perbedaan dalam konsepsi kepemimpinan dan tanggung jawab politik di berbagai budaya, memperluas penelitian Jiang (2019) tentang retorika kepemimpinan politik di AS dan China.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang tindak tutur performatif dalam konteks politik lintas bahasa dan budaya. Dengan mengintegrasikan perspektif dari linguistik, analisis wacana kritis, dan studi politik komparatif, penelitian ini memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam legitimasi kekuasaan dan konstruksi identitas nasional. Temuan-temuan ini tidak hanya memperkaya literatur tentang analisis wacana politik, tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk pemahaman lintas budaya dalam diplomasi dan hubungan internasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan berevolusi seiring waktu dan bagaimana mereka diinterpretasikan dan diterima oleh masyarakat di era digital dan globalisasi.

#### 4. Simpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan beberapa temuan penting mengenai tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan di lima negara yang berbeda: Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Nigeria. Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Universalitas dan partikularitas: terdapat struktur universal dalam tindak tutur performatif sumpah jabatan, seperti penggunaan verba performatif eksplisit dan komitmen terhadap konstitusi atau hukum tertinggi. Namun, realisasi linguistik dan pragmatis dari sumpah tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-

- kultural masing-masing negara, mencerminkan partikularitas dalam ekspresi komitmen politik. Sumpah jabatan tidak hanya berfungsi sebagai ritual hukum formal, tetapi juga sebagai alat untuk menegaskan identitas nasional, melegitimasi kekuasaan, dan merefleksikan nilai-nilai fundamental suatu bangsa. Hal ini terlihat dari variasi dalam penekanan pada simbol-simbol nasional, nilai-nilai kultural, dan ideologi politik yang tercermin dalam sumpah masing-masing negara.
2. Pengaruh sosio-kultural: faktor-faktor sosio-kultural, seperti sejarah, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai masyarakat, memiliki pengaruh signifikan terhadap formulasi dan penyampaian sumpah jabatan. Hal ini terlihat jelas dalam variasi penggunaan referensi agama, penekanan pada nilai-nilai spesifik, dan orientasi terhadap figur atau institusi tertentu dalam sumpah. Penggunaan modalitas deontik yang mencerminkan kewajiban dan komitmen merupakan fitur umum dalam sumpah jabatan di semua negara yang diteliti. Namun, tingkat dan cara pengekspresiananya bervariasi, mencerminkan perbedaan dalam konsepsi tanggung jawab dan kewajiban pemimpin politik.
  3. Legitimasi dan konstruksi kekuasaan: sumpah jabatan berperan penting dalam proses legitimasi kekuasaan dan konstruksi otoritas politik. Melalui tindak tutur performatif, sumpah tidak hanya menyatakan komitmen, tetapi juga menciptakan realitas sosial-politik baru di mana legitimasi pemimpin dikukuhkan. Meskipun sumpah jabatan sering dianggap sebagai tradisi yang tidak berubah, penelitian ini menunjukkan adanya adaptasi subtle terhadap konteks kontemporer, seperti terlihat dalam variasi pilihan kata dan penekanan pada isu-isu tertentu yang mencerminkan prioritas nasional saat ini.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman lintas budaya dalam analisis wacana politik. Perbedaan dalam formulasi dan penyampaian sumpah jabatan mencerminkan variasi dalam konsepsi kepemimpinan, kekuasaan, dan tanggung jawab politik di berbagai budaya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas tindak tutur performatif dalam konteks politik lintas bahasa dan budaya. Temuan-temuan ini tidak hanya relevan bagi studi linguistik dan analisis wacana, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang legitimasi politik, konstruksi identitas nasional, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat global yang semakin terhubung.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana tindak tutur performatif dalam sumpah jabatan berevolusi seiring waktu dan bagaimana mereka diinterpretasikan dan diterima oleh masyarakat di era digital dan globalisasi. Selain itu, studi komparatif yang lebih luas, mencakup lebih banyak negara dan tradisi politik, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang universal dan partikular dalam ekspresi komitmen politik di seluruh dunia.

**Daftar Pustaka**

- Asad, T. (2003). *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.
- Austin, J. L. (1962). *How To Do Things With Word*. Oxford University Press.
- Bellah, R. N. (1967). Civil Religion in America. *Daedalus*, 96(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1723045>
- Blommaert, J. (2005). *Discourse: A Critical Introduction*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2020.3041351>
- Charteris-Black, J. (2018). *Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor*. Palgrave Macmillan.
- Cheibub, J. A., Gandhi, J., & Vreeland, J. R. (2022). Democracy and dictatorship revisited. *Public Choice*, 182(1), 189–218.
- Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*. Routledge. <https://doi.org/10.1126/science.abc9000>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publication Inc.
- Culpeper, J., & Terkourafi, M. (2017). Chapter 2 . Pragmatics and ( im ) politeness. 1–21.
- Duranti, A. (2006). Narrating the Political Self in a Campaign for U.S. Congress. *Language in Society*, 35(4), 467–497. <https://doi.org/10.1007/s00330-020-06995-3>
- Edelman, M. (1985). *The Symbolic Uses of Politics*. University of Illinois Press.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102>
- Fox, J. (2020). *Thou Shalt Have No Other Gods before Me: Why Governments Discriminate against Religious Minorities*. Cambridge University Press.
- Gijn, R. V., & Muysken, P. (2020). Linguistic Areas and Linguistic Convergence. *Annual Review of Linguistics*, 6(2), 405–424.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine.

- Gumperz, J. J., & Cook-Gumperz, J. (2008). Studying Language, Culture, and Society: Sociolinguistics or Linguistic Anthropology? *Journal of Sociolinguistics*, 12(4), 532–545. <https://doi.org/10.1109/5.771073>
- Iedema, R. (2011). Discourse Studies in the 21st Century: A Response to Mats Alvesson and Dan Kärreman's "Decolonializing Discourse." *Human Relations*, 64(9), 1163–1176. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-73112-w>
- Jiang, X. (2019). Rhetoric of Political Leadership in the US and China: A Comparative Study. *Discourse & Society*, 30(3), 257–275. <https://doi.org/10.1000/xyz123>
- Kampf, Z. (2021). Political Discourse Analysis: From the Legacy of the Past to Current Challenges. *Discourse & Society*, 32(2), 186–202.
- Kecskes, I. (2022). *Intercultural Pragmatics*. In *Oxford University Press*.
- Krzyżanowski, M., Forchtner, B. (2021). The Routledge Handbook of Language and Politics. In *Routledge*.
- Lailiyah, N. (2021). Tindak Tutur Ekspresif Meminta Maaf Terpidana Korupsi di Indonesia. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 6(1), 215.
- Lailiyah, N., Djatmika, D., Santosa, R., & Sumarlam, S. (2023). Realizing Complaining Speech Acts of Covid-19 Survivors with a Gender and Education Perspective. *International Journal of Society, Culture & Language (IJSCL)*, 11(1), 1–18.
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? Democratization. *Third World Quarterly*, 26(7), 1095–1113.
- Moffitt, B. (2020). *Populism*. Polity Press.
- Mooney, A. (2018). *Language and Populist Politics*. In *The Routledge Handbook of Language and Politics*. Routledge.
- Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2021). The Cognitive Empire, Politics of Knowledge and African Intellectual Productions: Reflections on Struggles for Epistemic Freedom and Resurgence of Decolonisation in the Twenty-First Century. *Third World Quarterly*, 42(5), 882–901.
- Oishi, E. (2020). *Rethinking the Philosophy of Speech Acts*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1039/D0NR07553G>
- Rees, M. A. (2015). The Presidential Oath of Office in US Inaugural Addresses. *Journal of Argumentation in Context*, 4(1), 19–35. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>
- Reyes, A. (2015). Building Intimacy Through Linguistic Choices, Text Structure and Voices in Political Discourse. *Language & Communication*, 43(3), 58–71.

<https://doi.org/10.1016/j.nresae.2020.116762>

- Şahin, H., Sert, O., & Demir, S. (2019). The Rhetorical Structure of Political Speeches: A Comparative Analysis of Turkish and English Speeches. *Discourse & Society*, 30(4), 380–398. <https://doi.org/10.1371/journal.pn32.0230615>
- Schäffner, C. (2018). Translation and institutions. In *In The Routledge Handbook of Translation and Politics* (pp. 204–220). Routledge. <https://doi.org/10.1111/jan.14423>
- Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. E. (Eds. . (2001). *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwill Publishers.
- Schneider, E. W. (2020). *English Around the World: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1969a). *A Taxonomy of Illocutionary Acts*. Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1969b). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Tonnard, Y. M. (2021). *Visual Communication in Politics*. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.04.012>
- Vessey, R. (2017). Language Ideologies in Social Media: The Case of Pastagate. *Journal of Language and Politics*, 16(4), 511–534. <https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab67a4>
- Wierzbicka, A. (2003). *Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Mouton de Gruyter. <https://doi.org/10.1080/14759450-110055436>
- Wodak, R. (2021). *The Politics of Fear: The Shameless Normalization of Far-Right Discourse*. Sage Publication.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds. . (2015). *Methods of Critical Discourse Studies*. Sage Publications.